



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS SOSIAL

Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1B Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota
Kota Pontianak Kalimantan Barat - 78117 Telp. (0561) 81808969
Laman <https://dinsos.pontianak.go.id> Pos-el dinsos@pontianak.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DIANA, S.E
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T
Jabatan : Wali Kota Pontianak
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

WALI KOTA PONTIANAK,


Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK,


DIANA, S.E
Pembina Tingkat I/IVb
NIP 197010231996032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,269
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,084
	1. Meningkatkan Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%
	2. Meningkatkan Taraf Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%
	3. Penyaluran Bantuan Sosial yang Optimal	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).	100%
	4. Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai ketentuan	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial sesuai Ketentuan	100%
	5. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial Kota Pontianak	82

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 1.947.141.400,00	APBD
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 1.700.000,00	APBD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.094.665.266,00	APBD
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 2.472.963.847,00	APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp 416.488.375,00	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.930.537.438,00	APBD
	Jumlah	Rp. 13.863.496.326,00	

Pontianak, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

WALI KOTA PONTIANAK,



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T

Pihak Pertama,

PIL. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK,



DIANA, S.E

**Pembina Tingkat I/IVb
NIP 197010231996032001**



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS SOSIAL

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1b Pontianak, Kalimantan Barat 78117

Telp (0561) 8108969

Laman : dinsos.pontianak.go.id Pos-el : dinsos@pontianak.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD IRFAN ISLAMY, S.IP., M.A.P.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial Kota Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIANA, S.E.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak

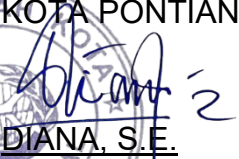
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 12 Januari 2026

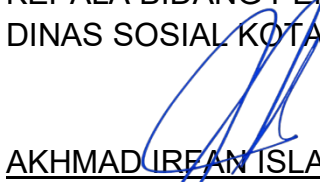
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK,


DIANA, S.E.

Pembina Tk. I/IVb

NIP 197010231996032001

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK,


AKHMAD IRFAN ISLAMY, S.IP., M.A.P.

Penata Tk. I/IIId

NIP 1988060720070011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH

No.	Outcome/Output	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%
	Meningkatnya keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang mendapatkan pelatihan	100%
	1. Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	1 Dokumen
	2. Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Keluarga
	3. Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	7 Lembaga
	4. Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial	62 Orang

	Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Bimbingan Teknis	
--	--	---	--

No	Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp. 20.000.000,00	APBD
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 1.000.000.000,00	APBD
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 150.000.000,00	APBD
4.	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 942.465.700,00	APBD
	Jumlah	Rp. 2.112.465.700,00	

Pontianak, 12 Januari 2026

PIL. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK,

DIANA, S.E.

Pembina Tk. I/IVb

NIP 197010231996032001

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK,

AKHMAD IREAN ISLAMY, S.IP., M.A.P.

Penata Tk. I/IIId

NIP 1988060720070011001



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS SOSIAL

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1b Pontianak, Kalimantan Barat 78117

Telp (0561) 8108969

Laman : dinsos.pontianak.go.id Pos-el : dinsos@pontianak.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARDIANA, S.E., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial Kota Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIANA, S.E.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 12 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK,

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK,


DIANA, S.E.
Pembina Tk. I/IVb
NIP 197010231996032001
MARDIANA, S.E., M.Si.
Pembina/ IVa
NIP 197404181999032006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH

No.	Outcome/Output	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Taraf Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100%
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah asal yang optimal sesuai prosedur	Persentase Tingkat penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%
	1. Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Orang
	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan layanan	100%
	1. Tersedianya Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai	200 Orang

		dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ Kota	
	2. Tersedianya Sandang	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/ Kota	300 Orang
	3. Tersedianya Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang
	4. Terlaksananya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Orang
	5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Orang
	6. Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan	150 Orang

		Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	
	7. Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/ Kota	60 Orang
	8. Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/ Kota	200 Orang
	9. Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan	20 Orang
	10. Terlaksananya Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Orang
	11. Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/ Kota	80 Orang
	12. Tersedianya Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantara, lanjut usia terlantar, gelandangan	40 Orang

		dan pengemis kewenangan Kabupaten/ Kota	
	13. Tersedianya Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan Kesehatan di luar panti kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Orang
	14. Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial	300 Orang
	15. Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	50 Orang

No	Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp. 10.000.000,00	APBD
2.	Penyediaan Permakanan	Rp. 550.000.000,00	APBD
3.	Penyediaan Sandang	Rp. 150.000.000,00	APBD
4.	Penyediaan Alat Bantu	Rp. 120.000.000,00	APBD
5.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 4.980.000,00	APBD
6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp. 30.000.000,00	APBD
7.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp. 48.575.200,00	APBD
8.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 14.980.000,00	APBD
9.	Layanan Data dan Pengaduan	Rp. 61.580.000,00	APBD
10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 31.980.000,00	APBD
11.	Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. 5.000.000,00	APBD
12.	Layanan Rujukan	Rp. 5.000.000,00	APBD
13.	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 5.000.000,00	APBD
14.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Rp. 15.000.000,00	APBD
15.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial	Rp. 37.175.200,00	APBD
16.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp. 120.980.000,00	APBD

	Jumlah	Rp. 1.210.250.400,00	
--	--------	----------------------	--

Pontianak, 12 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK,



DIANA, S.E.
Pembina Tk. I/IVb
NIP 197010231996032001

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK,



MARDIANA, S.E., M.Si.
Pembina/ IVa
NIP 197404181999032006



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS SOSIAL

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1b Pontianak, Kalimantan Barat 78117

Telp (0561) 8108969

Laman : dinsos.pontianak.go.id Pos-el : dinsos@pontianak.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN EKA PURNAMA, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
Dinas Sosial Kota Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIANA, S.E.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 12 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK,



DIANA, S.E.
Pembina Tk. I/IVb
NIP 197010231996032001

KEPALA BIDANG BANTUAN DAN
JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK,



DIAN EKA PURNAMA, S.E., M.M.
Pembina/ IVa
NIP 197302031992032005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH

No.	Outcome/Output	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelayanan Bantuan Sosial yang Optimal	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	100%
	1. Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota yang didata	40.000 Orang
	2. Terfasilitasinya Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Orang
	3. Terfasilitasinya Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	4.312 Orang
	4. Terkelolanya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usulan penindaklayakan, usulan yang terverifikasi dan tervalidasi dan usulan perbaikan yang dilaksanakan	20.000 Usulan

2.	Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial sesuai ketentuan	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial sesuai ketentuan	100%
	1. Tersedianya Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	350 Orang
	2. Tersedianya Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kabupaten/ Kota	200 Orang
	3. Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Orang
	4. Terlaksananya Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/ Kota	12 Orang
	5. Tersedianya Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian	100 Orang

		kewenangan Kabupaten/ Kota	
	6.. Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang

No	Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 450.000.000,00	APBD
2.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp. 378.099.500,00	APBD
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial kesejahteraan Keluarga	Rp. 2.896.301.200,00	APBD
4.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 34.980.000,00	APBD
5.	Penyediaan Makanan	Rp. 142.090.000,00	APBD
6.	Penyediaan Sandang	Rp. 159.225.000,00	APBD
7.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp. 31.135.000,00	APBD
8.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 30.000.000,00	APBD
9.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp. 20.000.000,00	APBD
10.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp. 28.230.600,00	APBD
	Jumlah	Rp. 4.170.061.300,00	

Pontianak, 12 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK,



DIANA, S.E.
Pembina Tk. I/IVb
NIP 197010231996032001

KEPALA BIDANG BANTUAN DAN
JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK,



DIAN EKA PURNAMA, S.E., M.M.
Pembina/ IVa
NIP 197302031992032005



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS SOSIAL

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1b Pontianak, Kalimantan Barat 78117

Telp (0561) 8108969

Laman : dinsos.pontianak.go.id Pos-el : dinsos@pontianak.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIANA, S.E.

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kota Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DIANA, S.E.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 12 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK,



DIANA, S.E.

Pembina Tk. I/IVb

NIP 197010231996032001

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK,

DIANA, S.E.

Pembina Tk. I/IVb

NIP 197010231996032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH

No.	Outcome/Output	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	82
	Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%
	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
	2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
	3. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
	4. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	10 Laporan

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	5. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
	6. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan
	7. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi SKPD	12 Dokumen
	8. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48 Laporan
	9. Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
	10. Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket
	11. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	5 Orang
	12. Tersedianya komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan	1 Paket

		bangunan kantor yang disediakan	
	13. Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket
	14. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket
	15. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen
	16. Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Laporan
	17. Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen
	18. Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit
	19. Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan
	20. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan

	21. Tersedianya Jasa Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan
	22. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
	23. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit
	24. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 Unit
	25. Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit

No	Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.625.000,00	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 6.000.000,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 7.500.000,00	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 15.000.000,00	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 23.125.000,00	APBD
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.518.259.277,00	APBD
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 275.400.000,00	APBD
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 14.920.000,00	APBD
9.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 2.500.000,00	APBD
10.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Rp. 42.620.000,00	APBD
11.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 45.000.000,00	APBD
12.	Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp. 29.839.950,00	APBD
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 120.000.000,00	APBD
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 80.886.100,00	APBD
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 2.500.000,00	APBD
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 200.000.000,00	APBD

17.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Rp. 50.000.000,00	APBD
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 200.000.000,00	APBD
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 12.000.000,00	APBD
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp. 222.327.350,00	APBD
21.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Rp. 20.000.000,00	APBD
22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.066.729.200,00	APBD
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 159.120.000,00	APBD
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 111.010.000,00	APBD
25.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 100.000.000,00	
	Jumlah	Rp. 8.329.361.877,00	

Pontianak, 12 Januari 2026


 Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
 KOTA PONTIANAK,

DIANA, S.E.
 Pembina Tk. I/IVb
 NIP 197010231996032001

SEKRETARIS DINAS SOSIAL
 KOTA PONTIANAK,

DIANA, S.E.
 Pembina Tk. I/IVb
 NIP 197010231996032001